

## BAB IV

### KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa perubahan kebijakan luar negeri Turki terhadap pengungsi Suriah merupakan respons terhadap krisis multidimensional yang kompleks, yang mencakup aspek sosial, ekonomi, politik, dan keamanan, baik di tingkat domestik maupun internasional. Pada awal krisis Suriah, kebijakan luar negeri Turki didorong oleh prinsip *zero problems with neighbours*, solidaritas kemanusiaan, serta komitmen terhadap Konvensi Jenewa 1951. Turki membuka pintu bagi jutaan pengungsi sebagai bentuk tanggung jawab moral dan strategi *soft power* untuk memperkuat identitas nasional berbasis neo-ottomanisme. Namun, seiring waktu, kebijakan ini menghadapi berbagai tantangan. Jumlah pengungsi yang terus meningkat memunculkan tekanan besar terhadap kapasitas negara, khususnya di sektor ekonomi, sosial, dan keamanan. Ketegangan antara pengungsi dan masyarakat lokal semakin meningkat, beban fiskal bertambah, dan pasar tenaga kerja menjadi semakin kompetitif.

Perubahan signifikan dalam kebijakan mulai terlihat pada tahun 2018, ketika Turki mulai membangun tembok perbatasan sepanjang 764 kilometer, membentuk *safe zone* di wilayah Suriah utara, dan meluncurkan beberapa operasi militer seperti *Operation Olive Branch* (2018), *Operation Peace Spring* (2019), dan *Operation Spring Shield* (2020). Di sisi domestik, kebijakan pemulangan pengungsi secara sukarela juga mulai diinstitusionalisasi, termasuk pembangunan rumah di wilayah Suriah utara dan pernyataan resmi Presiden Erdogan tentang rencana pemulangan satu juta pengungsi. Dinamika politik domestik, terutama menjelang pemilu 2018 dan 2023, memperkuat tekanan terhadap pemerintah untuk mengambil kebijakan yang lebih tegas terkait isu pengungsi, apalagi dengan meningkatnya sentimen publik yang mulai melihat keberadaan pengungsi sebagai beban ekonomi.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan kebijakan luar negeri Turki terhadap pengungsi Suriah tidak hanya bersifat adaptif atau berskala kecil,

melainkan menyentuh aspek tujuan strategis jangka panjang. Artinya, perubahan tersebut tidak hanya berada pada *level adjustment* atau *program changes*, tetapi pada *level goal changes*, yaitu ketika negara tidak hanya mengubah cara atau alat pelaksanaan kebijakan, tetapi juga meredefinisi arah dan tujuan utama kebijakannya. Tujuan awal yang bersifat normatif, seperti solidaritas regional, nilai-nilai kemanusiaan, dan pencitraan internasional, telah bergeser menjadi tujuan yang lebih realistis: menjaga stabilitas internal, mencegah ketegangan sosial, dan memperkuat keamanan nasional.

Temuan ini juga sejalan dengan model perubahan kebijakan luar negeri Jakob Gustavsson. Menurut Gustavsson, sumber-sumber yang mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri terdiri dari faktor politik dan ekonomi domestik, serta faktor politik dan ekonomi internasional. Dalam konteks ini, Secara domestik, isu pengungsi menjadi alat politik dalam pemilu 2018 dan 2023, memicu perdebatan antarpantai dimana partai-partai oposisi seperti CHP, IYI, dan ZP memanfaatkan isu ini untuk mengkritik pemerintah dan menekankan urgensi pemulangan pengungsi. Pengungsi Suriah juga menambah tekanan terhadap ekonomi nasional akibat meningkatnya pengangguran, persaingan di sektor informal, dan krisis ekonomi. Keadaan ini kemudian diperparah dengan pandemi COVID-19 yang menekan pasar kerja dan memperburuk ketimpangan sosial. Dalam konteks internasional, Turki menghadapi tantangan geopolitik terkait perang Suriah, seperti ancaman dari kelompok Kurdi, ketegangan dengan Rusia dan Uni Eropa, serta kerugian ekonomi akibat konflik dan sanksi internasional. Dengan demikian, kondisi tekanan politik dan ekonomi Turki menjadi kunci dalam menggeser tujuan kebijakan luar negerinya terhadap isu pengungsi.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, penulis menyimpulkan bahwa hipotesis awal penelitian—yakni bahwa perubahan kebijakan luar negeri Turki terhadap pengungsi Suriah berada pada *level goal changes*—telah terbukti melalui

dinamika kebijakan antara 2018 hingga 2023. Model perubahan kebijakan luar negeri yang dikembangkan oleh Jakob Gustavsson memperkuat analisis mengenai mengapa dan bagaimana kebijakan luar negeri Turki mengalami perubahan pada *level goal changes*.

